

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Kutaampel dan Desa Karyamakmur menunjukkan adanya perbedaan dalam jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM), meskipun kedua desa mengikuti prosedur yang sama dalam seleksi penerima manfaat. Perbedaan ini terkait dengan jumlah penduduk dan tingkat kemiskinan yang ada di masing-masing desa, di mana Desa Kutaampel dengan jumlah penduduk yang lebih banyak memiliki indeks kemiskinan yang lebih tinggi, sehingga jumlah KPM lebih banyak, sedangkan Desa Karyamakmur dengan jumlah penduduk sedikit lebih rendah memiliki angka kemiskinan yang lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak selalu mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara langsung.

Selain itu, dalam pelaksanaannya, terdapat perubahan signifikan dalam sistem pendataan penerima manfaat sejak 2021 dengan penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sistem ini lebih terstruktur dan terkoordinasi, memanfaatkan data yang lebih valid untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Meskipun demikian, ada kendala dalam pendataan, seperti ketidakcocokan data antara yang tercatat di sistem dengan kondisi lapangan, kelambatan dalam pemrosesan data, serta adanya KPM yang sudah tidak layak menerima bantuan namun masih tercatat dalam sistem. Kendala ini menghambat efektivitas program, karena dana tidak sepenuhnya diterima oleh mereka yang paling membutuhkan.

Program PKH tidak hanya berbasis pada status ekonomi, tetapi juga pada tiga komponen utama, yakni kesehatan, pendidikan, dan sosial. Penentuan KPM melibatkan verifikasi berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif untuk memastikan bantuan diterima oleh keluarga yang membutuhkan. Kriteria kesehatan, pendidikan, dan sosial ini menjadi indikator utama dalam seleksi KPM, memastikan bahwa bantuan sosial

tepat sasaran dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat yang miskin.

Peran Kementerian Sosial dan pendamping sangat penting dalam pengelolaan PKH, dengan pendamping bertugas memonitor dan memberikan edukasi kepada KPM. Proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah desa, kecamatan, dan Dinas Sosial kemudian diteruskan ke Pusat Data dan Informasi Kemensos untuk verifikasi dan penentuan siapa yang berhak menerima bantuan. Meskipun ada sistem digital yang mendukung proses ini, sering kali data yang masuk memerlukan verifikasi yang memakan waktu, sehingga memperlambat pembaruan data.

Dalam hal ini, evaluasi berkala dan perbaikan sistem sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program, seperti memperbaiki sistem pendataan dengan menggunakan teknologi yang lebih efisien dan real-time. Peningkatan kapasitas pendamping PKH dalam memberikan edukasi dan pemantauan juga menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan tujuan program, yakni untuk meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial keluarga miskin.

Faktor politik kesejahteraan menjadi salah satu elemen yang memengaruhi efektivitas program ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Kutaampel, alokasi bantuan lebih tepat sasaran, namun di Desa Karyamakmur terdapat ketimpangan yang lebih tinggi, di mana beberapa kelompok masyarakat yang seharusnya menerima manfaat tidak mendapatkan akses yang sama. Penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penentuan penerima manfaat, serta memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan lebih berfokus pada prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan tanpa ada pengaruh politik yang merugikan. Penyempurnaan sistem monitoring dan evaluasi juga perlu dilakukan untuk memastikan program PKH berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pelaksanaan PKH di Desa Kutaampel menunjukkan kekuatan kapasitas individu yang cukup baik. Aparatur desa dan pendamping PKH secara konsisten memperbarui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan akurat dan tepat, mencerminkan kemampuan analitis yang tinggi. Administrasi bantuan dikelola dengan baik, pencairan dilakukan sesuai jadwal, dan dokumentasi rapi. Hubungan interpersonal dengan KPM dan tokoh masyarakat juga dibangun secara efektif, sehingga menciptakan kepercayaan yang memperlancar pelaksanaan program. Sebaliknya, Desa Karyamakmur masih menghadapi tantangan signifikan pada level individu. Kemampuan pendamping dan tenaga teknis dalam melakukan pemutakhiran data dan verifikasi belum maksimal, menyebabkan akurasi data DTKS rendah. Ketidaktepatan informasi ini berdampak pada penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran, sebagaimana diungkapkan oleh beberapa KPM. Selain itu, koordinasi dan relasi antara aparatur desa, pendamping, dan masyarakat belum optimal, yang mengganggu efektivitas proses implementasi.

Pada level organisasi, kedua desa menunjukkan perbedaan yang mencolok. Desa Kutaampel memanfaatkan teknologi secara efisien; sistem pengelolaan data terintegrasi dan rapat koordinasi berlangsung secara reguler, menunjang akuntabilitas dan kemudahan evaluasi. Sebaliknya, Desa Karyamakmur masih menggunakan sistem manual yang rentan terhadap kesalahan dan kurang rutin melakukan koordinasi antar lembaga, sehingga menghambat tata kelola PKH secara menyeluruh. Aspek sistemik memperlihatkan bahwa kedua desa tunduk pada regulasi Kemensos dan mematuhi SOP nasional. Namun, pemanfaatan aplikasi e-PKH lebih optimal di Desa Kutaampel dibandingkan dengan Karyamakmur, yang masih terbatas dalam penggunaan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi otomatis dan pemrosesan digital ini penting untuk efisiensi distribusi bantuan dan pemantauan real-time seperti yang ditemukan dalam evaluasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Cibuaya, Karawang.

Meski demikian, salah satu kelemahan Desa Kutaampel adalah rendahnya kepatuhan terhadap SOP lokal, terlihat dari beberapa

penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan PKH. Ini menunjukkan bahwa kapasitas teknis dan administrasi saja tidak cukup; implementasi membutuhkan integritas tinggi dan pemahaman mendalam tentang aturan untuk memastikan dana digunakan sesuai tujuan kesejahteraan sosial. Dua desa tersebut tetap berhasil menjalankan aspek fundamental operasional PKH, yaitu pencairan bantuan tepat waktu dan dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah yang kokoh. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan pada pendanaan atau peraturan, tetapi lebih pada kualitas pelaksanaan di tingkat desa—sesuai temuan evaluasi di Kecamatan Telagasari, Karawang, yang menyebut bahwa meskipun SOP diikuti, efektivitas dan pemerataan manfaat program masih belum optimal .

Dengan demikian, rekomendasi prioritas adalah peningkatan kapasitas teknis dan manajerial di tingkat desa, pelatihan penggunaan teknologi e-PKH, serta penguatan mekanisme monitoring dan akuntabilitas lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip **\*\*politik kesejahteraan\*\***, yang menekankan bahwa efektivitas pelayanan publik bergantung pada sinergi antara dukungan struktural pemerintah dan kapasitas lokal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **5.2 Saran**

Untuk skripsi dengan judul "Perbandingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Kutaampel dan Desa Karyamakmur Kabupaten Karawang 2024: Analisis Penentuan Kelompok Penerima Manfaat Berbasis Politik Kesejahteraan," berikut adalah saran akademis dan saran praktis yang dapat disarankan berdasarkan temuan penelitian tersebut:

### **5.2.1 Saran Akademis**

- **Perluasan Studi:** Penelitian ini sebaiknya dapat diperluas dengan melakukan studi yang lebih mendalam di tingkat kabupaten atau provinsi, untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang pengaruh politik kesejahteraan dalam penentuan penerima manfaat PKH. Hal ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik terkait dinamika

sosial dan politik yang mempengaruhi implementasi program serupa di wilayah yang berbeda.

- **Studi Komparatif Lainnya:** Penelitian lebih lanjut bisa dilakukan dengan membandingkan lebih banyak desa atau daerah lainnya yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang berbeda. Hal ini akan memperkaya literatur mengenai dinamika pelaksanaan PKH di Indonesia dan memberikan wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program ini.
- **Pengembangan Teori:** Penelitian ini dapat menjadi landasan untuk mengembangkan teori-teori baru dalam bidang kebijakan sosial, khususnya yang berkaitan dengan politik kesejahteraan. Penelitian lebih lanjut bisa menggali lebih dalam bagaimana politik lokal berperan dalam implementasi kebijakan kesejahteraan yang lebih adil dan tepat sasaran.
- **Metode Penelitian Lainnya:** Penelitian selanjutnya bisa menggunakan metode yang lebih beragam, seperti wawancara mendalam dengan aparat desa, kelompok masyarakat penerima manfaat, dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk menggali perspektif yang lebih beragam tentang pengaruh politik kesejahteraan terhadap penentuan penerima manfaat.

### **5.2.2 Saran Praktis**

- **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas:** Untuk meningkatkan efektivitas program PKH, sebaiknya pemerintah desa dan aparat terkait lebih menekankan pentingnya transparansi dalam proses penentuan penerima manfaat. Prosedur yang jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan akan mengurangi pengaruh politik yang tidak diinginkan dan memastikan bantuan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan.

- Penyempurnaan Proses Seleksi Penerima Manfaat: Pemerintah desa perlu memperbaiki dan menyempurnakan proses seleksi penerima manfaat dengan mengoptimalkan penggunaan data yang valid dan terbaru, serta melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi untuk memastikan penentuan penerima manfaat benar-benar berdasarkan kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.
- Pendidikan dan Sosialisasi Program PKH: Sosialisasi yang lebih intensif tentang tujuan dan mekanisme pelaksanaan PKH harus dilakukan oleh pemerintah desa agar masyarakat memahami dengan jelas cara kerja program ini. Ini akan mengurangi potensi penyalahgunaan atau manipulasi yang berkaitan dengan politik lokal.